

JDIH	
2024	
PERBUB KAB.NGANJUK NO.35, BD 2024/NO.35, 9 HLM	
PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN NGANJUK	
ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a. bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur dan terselenggara dengan baik, sebagai salah satu bentuk pemenuhan layanan kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum</li> <li>b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyebutkan Bupati membentuk JDIH Kabupaten</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2016; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, monitoring dan pengawasan, pendanaan. Pembentukan JDIH Kab. Nganjuk dikelola melalui website <a href="https://jdih.nganjukkab.go.id/">https://jdih.nganjukkab.go.id/</a> yang dapat diakses oleh semua orang. Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dilakukan setahun sekali. Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari APBD dan /atau lain-lain pendapatan yang sah.</li> </ul>
CATATAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Desember 2024;</li> <li>- Jumlah halaman penjelasan 9 halaman.</li> </ul>